

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia diselenggarakan pertama kali pada tanggal 01 Juni 2005 yang merupakan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) yaitu “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang kemudian dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pilkada secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang RI tahun 1945. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada secara langsung.¹

Penyelenggaraan pilkada sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era reformasi. Dilaksanakannya pilkada bertujuan agar

¹ Muhamad Irham, 2016, “*Makna pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Menurut pasal 18 ayat (4) UUD 1945*”, Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara.

kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu artinya penyelenggaraan pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah dengan harapan kepala daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pilkada secara langsung di Indonesia berawal sejak era reformasi yang menandakan bahwa adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Tingkat kualitas demokrasi di suatu negara salah satunya bisa diukur dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakatnya dalam memilih para pemimpin negara. Menurut David Held demokrasi memiliki mekanisme dasar untuk dapat menolak atau menerima konsep apapun tentang kebijakan publik, dan juga harus lebih bisa menerima apa yang menjadi keinginan rakyat itu sendiri, karena demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sejatinya, penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Sejalan dengan itu, Huntington & Nelson juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam Negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan

pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warga negara yang bertanggung jawab.²

Dalam hal ini Negara-negara yang menyebut negaranya sebagai Negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai sarana memilih pejabat-pejabat publik dibidang eksekutif maupun legislatif begitu juga dengan Indonesia Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sebuah pesta rakyat dan sarana dalam menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat. Pemilu dapat diartikan sebagai suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi¹.

Pemilu merupakan bagian dari pintu gerbang dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik.

Pemilu merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia dan juga merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, baik ditingkat pusat maupun daerah. Selain itu Pemilu yang diadakan dikebanyakan Negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi

² Cucu Sutrisno, 2017, "*Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*", Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 2.

keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.³

Pemilihan bupati Kabupaten Sarolangun tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Wali kota/Bupati Sarolangun periode 2017-2022. Terdapat dua pasangan calon Wali kota/Bupati dan Wakil Wali kota/Bupati yang mendaftar pada Pemilihan Wali kota/Bupati Serentak 2017 ini. Mantan Bupati Sarolangun pertama, Muhammad Madel mencalonkan diri bersama Musharsya dengan didukung oleh PKS, Hanura, dan Demokrat. Selain itu petahana, Cek Endra turut mencalonkan diri menjadi Wali kota/Bupati didampingi oleh Hillalatil Badri. Pasangan ini diusung PKB, Nasdem, PAN, PPP, Gerindra, PDIP, dan Golkar. Pilkada tersebut berhasil dimenangkan oleh Cek Endra dan Hillalatil Badri dengan perolehan suara sebesar 55,76%.

Meskipun Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berjalan relatif lancar dan aman, sebagai bentuk dari perkembangan kehidupan demokrasi yang kian modern, sementara disisi lain tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat partisipasi dalam kehidupan politik sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa lima tahun kedepan.

³ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), Hlm. 73

Tabel 1.1**Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Sarolangun 2017**

Data	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pemilih	96.811	95.704	193.416
Pengguna Hak pilih	66.198	68.554	135.217
Memilih (%)	68.4	71.6	69.9
Tidak Memilih (%)	31.6	28.4	30.1

Tabel 1.2**Partisipasi Pemilih Pilkada Sarolangun 2011**

Data	Jumlah
Pengguna Hak Pilh	176.774
Memilih (%)	75.01
Tidak Memilih (%)	24.99

Sumber: KPU Sarolangun

Dari penyelenggaraan pilkada yang telah berlangsung itu diperoleh data bahwa terjadi penurunan angka partisipasi masyarakat Sarolangun. Dibandingkan dengan pilkada 2011, pilkada tahun 2017 mengalami penurunan partisipasi masyarakat sebesar 6%. Sedangkan angka Golput meningkat drastis dari 24% menjadi 30,1 %. Menjadi menarik, dari 10 Kecamatan, Kecamatan Sarolangun sebagai pusat kota Kabupaten menjadi sorotan disbandingkan dengan Kecamatan

lainnya, tingkat partisipasinya pada tahun 2017 justru tidak mengalami peningkatan.

Tabel 1.3

Partisipasi pemilih perkecamatan pilkada Sarolangun 2017

Kecamatan	Partisipasi (%)
Air Hitam	61,4%
Batang Asai	78,1%
Bathin VIII	68,9%
Cermin Nan Gedang	71,6%
Limun	81,1%
Mandiingin	71,1%
Pauh	62,5%
Pelawan	71,0%
Sarolangun	69,4%
Singkut	70,2%

Sumber: KPU Sarolangun

Tabel 1.4**Partisipasi pemilih perkecamatan pilkada Sarolangun 2011**

Kecamatan	Partisipasi (%)
Air Hitam	71,26%
Batang Asai	82,17%
Bathin VIII	68,98%
Cermin Nan Gedang	77,84%
Limu	88,62%
Mandiangi	75,59%
Pauh	77,94%
Pelawan	77,61%
Sarolangun	75,85%
Singkut	69,69%

Sumber: KPU Sarolangun

Sebagai pembanding, dari tiga Kabupaten yang melaksanakan pilkada pada tahun 2017, angka partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Sarolangun menjadi yang terendah dibandingkan dengan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi. Jika melihat semua pilkada Jambi periode terbaru, Sarolangun menjadi kabupaten dengan partisipasi memilih masyarakat paling rendah dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Tabel 1.5**Partisipasi Pemilih Pilkada di Provinsi Jambi Tahun 2017**

Data	Sarolangun	Tebo	Muaro Jambi
Pemilih	193.416	221.583	267.865
Pengguna Hak pilih	135.217	167.206	195.741
Memilih (%)	69.9	75.5	73.1
Tidak Memilih (%)	30.1	24.5	26.1

Sumber: Data Olahan

Tabel 1.6**Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

No.	Kab/Kota	Tahun Pilkada	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Memilih (%)	Tidak Memilih (%)
1.	Sarolangun	2017	193.416	135.217	69.9	30.1
2.	Tebo	2017	221.583	167.206	75.5	24.5
3.	Muaro Jambi	2017	267.865	195.741	73.1	26.1
4.	Kota Jambi	2018	380.599	273.704	71.9	29.1
5.	Merangin	2018	250.524	192.275	76.7	23.2
6.	Kerinci	2018	212.458	151.385	71.2	28.7
7.	Batang Hari	2020	197.613	165.768	83.8	16.1
8.	Bungo	2020	239.690	171.645	71.6	28.3
9.	Tanjabar	2020	214.637	156.824	73.0	26.9
10.	Tanjabtlim	2020	165.181	132.114	79.9	20.0
11.	Sungai Penuh	2020	69.387	57.332	82.6	17.3

Sumber: Data Olahan

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya

mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.⁴

Partisipasi politik menjadi sangat penting dalam konteks dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta pengawasan penghitungan suara.⁵

Sebab kesadaran serta pemahaman politik merupakan bagian dari penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan

⁴ Dwi Haryono, “Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015” Jurnal Administrative Reform, Vol , No. 2, Juni 2018

⁵ Puti Nilam Suri, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui Tahun 2015*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017

politik (kampanye). Fenomena ini selalu muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Bila merujuk pada uraian tersebut, bahwa kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya merupakan suatu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, ukuran partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya kadar demokrasi yang berkembang di negara tersebut.

Merujuk pada penelitian serupa yang diteliti oleh Puti Nilam Sari dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Ukui Tahun 2015”. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi demokrasi dan partisipasi politik sebagai landasan teori untuk memperoleh hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif Comparative Casual Studies. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ukui.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Ukui dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Ukui sangat rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sosialisasi, sosial ekonomi, politik keyakinan, dan kesadaran politik. Perbedaan

dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya, penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada pemilihan Bupati di Kecamatan Ukui Tahun 2015, lalu metode yang digunakan dalam penelitian juga berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah tentang:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab menurunnya angka partisipasi politik masyarakat pada Kecamatan Bathin VIII Desa Limbur Tembesi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2017?
2. Apa langkah atau upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk mengantisipasi menurunnya angka partisipasi masyarakat Kecamatan Bathin VIII Desa Limbur Tembesi pada pilkada Kabupaten Sarolangun periode selanjutnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya angka partisipasi masyarakat Kecamatan Bathin VIII Desa Limbur Tembesi pada pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Penyelenggara pemilu untuk mengatasi penurunan angka partisipasi masyarakat

kecamatan VIII Desa Limbur Tembesi pada pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, akademisi dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berarti sebagai referensi terkait bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan peningkatan partisipasi politik pemilih.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana untuk menambah wawasan bagi pembaca dan juga memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan ikut serta seseorang dalam suatu kegiatan dan berperan aktif didalamnya. Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat tentunya menjadi tonggak untuk menentukan pemerintahan yang baik kedepannya, baik dari pemerintahan yang kecil yaitu desa hingga ke tingkat tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, Partisipasi memiliki tujuan

mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses pemilihan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat, dibutuhkan baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu.⁶

Sejalan dengan hal tersebut Suharyanto berpendapat bahwa Partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Secara garis besar partisipasi pada hakekatnya adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang lebih besar. Partisipasi hanya bermakna jika disertai dengan rasa tanggung jawab bagi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi adalah sikap dan penanaman diri yang ditentukan oleh setiap individu dalam situasi dan kondisi kelompok, yang pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan kelompok dan memikul setiap tanggung jawab bersama.⁷

Selanjutnya Budiardjo menyatakan bahwa Partisipasi politik merupakan sesuatu yang mempengaruhi sistem politik suatu negara demokrasi, karena tanpa partisipasi politik, sistem politik demokrasi tidak ada artinya. Partisipasi politik adalah partisipasi aktif seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan politik, antara lain melalui pemilihan pemimpin nasional dan

⁶ Sofyan Agus, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019*, *Dinamika Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8.1 (2021): 1-14.

⁷ Suharyanto, Agung. *Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2014, 2.2: 151-160.

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik).⁸

Partisipasi politik tentunya dapat berjalan dengan baik dan hal tersebut tentu ada banyak faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik. Pendidikan politik sudah seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan desa.

Ramlan Surbakti mengemukakan Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁹

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ramlan Surbakti menyebutkan tiga variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Ketiga, status sosial ekonomi seseorang¹⁰. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.

⁸ Budiardjo, Miriam, (2010), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal: 367.

⁹ Ramlan, surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Garsindo, Anggota Ikapi), 2010, Hal. 184.

¹⁰ *Ibid.*

Tiga Indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti antara lain : Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Dan Status Social Ekonomi¹¹

a. Kesadaran Politik

Proses pemilihan kepala desa adalah suatu kegiatan yang memerlukan kesadaran dan minat ataupun perhatian yang tinggi dari masyarakat setempat. Karena dalam pemilihan kepala desa memiliki tujuan untuk dapat menyaring para calon kepala desa yang akan dipilih, maka dari itu penting untuk masyarakat memiliki rasa minat dan perhatian yang tinggi terhadap pemilihan kepala desa.

b. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Penilaian terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memilih seorang pemimpin baik itu ditingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu desa diperlukan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat karena ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi makamasyarakat akan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara termasuk pemilihan kepala desa. Masyarakat tanpa ragu akan selalu ikut dalam setiap kegiatan yang akan diselenggarakan, Masyarakat akan menilai bagaimana suatu pemerintahan dapat menjalankan tugas nya dengan baik agar

¹¹ *Ibid.*

masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintahan tersebut, masyarakat berharap agar suara-suara rakyat atau aspirasi rakyat dapat di dengar dan di wujudkan demi kepentingan bersama.

c. Status Sosial Dan Ekonomi

Status sosial dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi politik khususnya pemilihan kepala desa. Status sosial meliputi pendidikan, kelompok, etnis, ras, dan agama. Bagaimanapun juga lingkungan sosial dapat mempengaruhi sikap atau perilaku, dan persepsi seseorang dalam bidang politik, Dalam hal ini khususnya pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut atau tidak dalam partisipasi politik. Faktor sosial menjadi alasan mengapa seseorang atau masyarakat tidak memilih.

Status ekonomi juga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dan menjadi alasan seseorang untuk tidak memilih. Dalam hal faktor ekonomi disebabkan karena ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus pada kemakmuran atau kesejahteraan masyarakatnya. Ketika sistem demokrasi terbuka lebar tetapi nyata nya tidak membawa manfaat atau dampak positif terhadap masyarakat, hal tersebutlah yang membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja demi membiayai kehidupannya daripada datang ke TPS untuk memilih. Status ekonomi yang dimaksud adalah tingkat lapisan kepemilikan kekayaan masyarakat. Semakin kaya atau semakin tinggi

tingkat status ekonomi seseorang maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politiknya begitu juga sebaliknya.

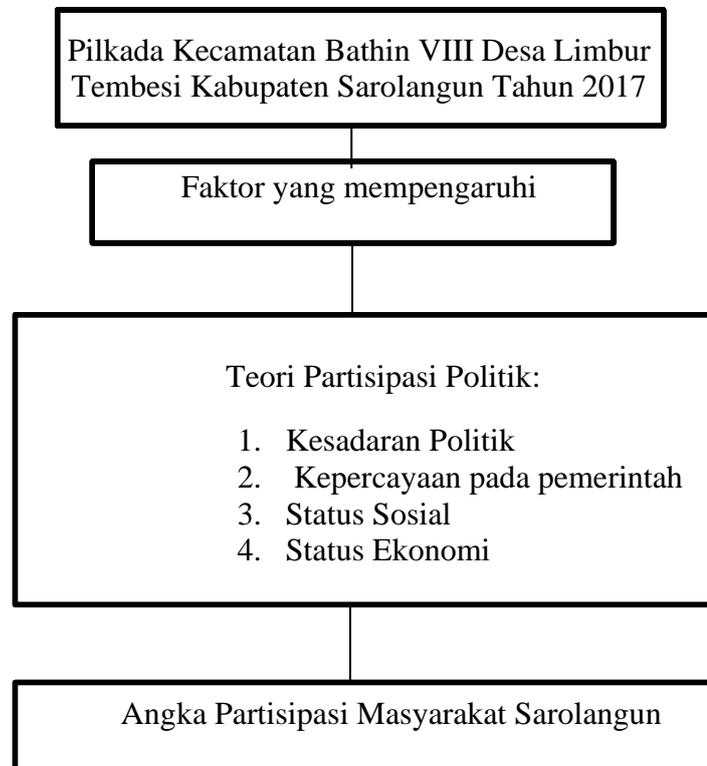
Peranan politik masyarakat dalam pemilihan memang erat kaitanya dengan faktor-faktor ataupun indikator yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya. Salah satunya dapat juga dilihat dari visi misi yang dipaparkan oleh kandidat dan juga personal branding yang ditampilkan oleh kandidat calon itu sendiri.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk mengkaji masalah ini peneliti menggunakan teori oleh Ramlan Surbakti bahwa faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggirendahnya partisipasi politik seseorang ialah adanya kesadaran politik, kepercayaan kepada Pemerintah (Sistem Politik), status sosial dan ekonomi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bathin VIII Desa Lambur Tembesi dalam pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2017.

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹²

1.7.2 Lokasi /Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bathin VIII desa Limbur Tembesi Kabupaten Sarolangun Jambi sebagai salah satu Kecamatan Kota yang mengalami penurunan angka partisipasi secara signifikan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bathin VIII desa Limbur Tembesi pada pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2017 serta faktor apa yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik masyarakat.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.¹³

a. Sumber Data Utama (Primer)

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

¹² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 225.

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive Sampling adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representative.¹⁴

¹⁴ *Ibid. Hlm. 48.*

Tabel 1.7

Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M. Fakhri	Ketua KPU Sarolangun	Proses pilkada 2017
2..	Rahmat Hidayat	Tokoh Pemuda Kecamatan Bathin Desa Limbur Tembesi	Mengetahui persepsi pemuda dalam memilih
3.	Bujang	Tokoh Masyarakat Kecamatan Bathin Desa Limbur Tembesi	Mengetahui persepsi masyarakat dalam memilih
4.	Maya	Tokoh Perempuan Kecamatan Bathin Desa Limbur Tembesi	Mengetahui Persepsi kelompok perempuan dalam memilih
5.	Ahmad, SH	Kades Tanjung Gagak	Mengetahui Persepsi Masyarakat di Desa Tanjung Gagak
6.	Sabli	Kades Muara Lati	Mengetahui Persepsi Masyarakat di Desa Muara Lati
7.	Zulman	Kades Rantau Gedang	Mengetahui Persepsi Masyarakat di Desa Rantau Gedang
8.	Hanafi	Kades Pulau Buayo	Mengetahui Persepsi Masyarakat di Desa Pulau Buayo
9.	Saidina Ali	Kades B. Penyabung	Mengetahui Persepsi Masyarakat di B. Panyabung
10.	Dr. Pahrudin HM, M.A	Pengamat Politik	Mengetahui Persepsi Masyarakat dalam memilih

Pemilihan informan penelitian diatas penulis anggap sudah sesuai kebutuhan dan representatif. M. Fakhri selaku ketua KPU Sarolangun penulis pilih karena yang bersangkutan merupakan pimpinan penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab penuh terkait teknis pelaksanaan pilkada yang tentunya mengetahui semua dinamika serta data yang penulis butuhkan nantinya. Selanjutnya, ketiga tokoh dari masing-masing kalangan seperti Rahmat Hidayat sebagai pemuda yang aktif di berbagai organisasi kepemudaan seperti Remaja Peduli Sesama Sarolangun, Gerakan Mahasiswa Sarolangun, KNPI Sarolangun, Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya penulis anggap cukup representatif mewakili kaum pemilih dari kalangan pemuda. Bujang, tokoh masyarakat kelurahan dusun Sarolangun, penulis pilih sebagai representasi masyarakat. Maya selaku tokoh perempuan penulis pilih karena latar belakangnya sebagai aktivis perempuan yang aktif di berbagai organisasi seperti, Kopri PMII Sarolangun, KNPI Sarolangun, GMS Sarolangun. Terakhir, Pahrudin selaku akademisi sekaligus pengamat politik Public Trust Insititute (PUTIN) penulis pilih untuk mengetahui dinamika pilkada dan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi memilih masyarakat.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan metodologi penelitian: dasar teori dan terapannya dalam penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang akan diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci.¹⁵

b. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lampau secara historis. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum- hukum dan lainya seperti foto, video, koran, majalah, yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁶

¹⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2006), hlm.70.

¹⁶ *Ibid.*

1.7.7 Teknik Analisis Data

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi

Data Mereduksi data sama hal dengan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok yang menjadi fokusnya, mencari tema dan polanya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan kategori. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan pekerjaan selanjutnya. Cara yang dipilih oleh peneliti dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan bagan dan teks naratif. Menggunakan bagan dapat memperjelas pola data-data yang diperoleh baik primer maupun skunder. Sementara teks naratif digunakan untuk penggambaran singkat mengenai bentuk bagan yang telah dibuat.

- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum turun lapangan. Kesimpulan awal ini bersifat sementara, dan akan berubah apabila pada saat turun lapangan tidak mendapatkan bukti-bukti yang mendukung data sebelumnya. Disinilah diperlukan verifikasi setelah penarikan kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Keabsahan data diartikan sebagai pengujian data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Teknik pengumpulan data, peneliti akan menganalisis beragam data primer maupun sekunder untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel.